

**ANALISIS PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP
BUDGETARY SLACK PADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Diajukan Oleh

AULIA MUKTI TAMA

4514013060



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

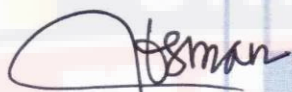
HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Mahasiswa : Aulia Mukti Tama
Stambuk/Nim : 4514013060
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE, M. Si, Ak, CA

Seri Suriani, SE, M. Si

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :

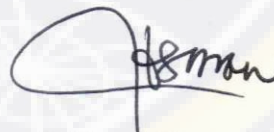
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi

Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE, M. Si, SH, MH.

Dr. Firman Menne, SE, M. Si, Ak, CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Mukti Tama

Nim : 4514013060

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack*
Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 6 Agustus 2018

Mahasiswa yang bersangkutan

Aulia Mukti Tama

**ANALISIS PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP
BUDGETARY SLACK PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

Oleh:

AULIA MUKTI TAMA

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

AULIA MUKTI TAMA. 2018. Skripsi. Analisis Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh DR. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Seri Suriani,SE.,M.Si.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh Asimetri Informasi terhadap *Budgetary Slack* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui cara pembagian kuesioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana dengan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya *Budgetary Slack* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Asimetri Informasi, *Budgetary Slack*

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF INFORMATION ASYMMETRY ON
BUDGETARY SLACK IN THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF
SOUTH SULAWESI**

By:

AULIA MUKTI TAMA

Prodi Accounting Faculty Of Economics

Bosowa University

ABSTRACT

AULIA MUKTI TAMA. 2018. Skripsi. Analysis of the Influence of Information Asymmetry Against Budgetary Slack The South Sulawesi Provincial Government was guided by DR. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA and Seri Suriani, SE., M.Si.

The purpose of this study was to analyze and describe the effect of Information Asymmetry on Budgetary Slack in the South Sulawesi Provincial Government. In this study, data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents. This study uses a simple regression model with SPSS software. The results of this study indicate that information asymmetry has a positive and significant effect on increasing Budgetary Slack in the South Sulawesi Provincial Government.

Keywords : Asymmetry Infomation, Budgetary Slack

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “ **Analisis Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu. M.Eng.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar SE,MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Bapak Thanwain,SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Firman Menne,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing I dan Ibunda Seri Suriani,SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan motivasi serta saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah.

Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.

7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Almarhum Bapak dan Ibu ku tercinta, kakak-kakak ku serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Terima kasih kepada seluruh SKPD di Pemerintahan Sulawesi Selatan atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat ku Aisyah Widya Amaliah, Isnianti Wahidah, Adhe Tryharyati, Ainun Aulia, Winda Puspitasari, Namira Indiani, Andini Naifah Billah, Rizka Ramadhani, Andi Amhar Naufal, Dela Tiara Sari, Nurfauziah, Fitrah Suciawati, Zulkifli, Tenri Ajeng, dan Andi Muh. Rafli yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih ku kepada sahabat ku Ayang Ariasa, Nurul Izzah, Andelitha Sanda Bunga, Andi Nurfahmi Auliah, Alya Syafiqah, Muliana Amin, Indri Rahayu, Nelly Ma'Rifah Utami, Kasriani, Nurul Husna, Fatmawati, Muhammad Try Utama, Andi Firdaus, Zulfikar Kadiliah dan semua teman-teman ku angkatan 2014 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan selama ini sejak penulis berkuliah di Universitas bosowa serta atas bantuan dan motivasi yang berarti bagi penulis.
11. Teman-teman KKN Kewirausahaan Angkatan 43 khususnya Posko 3 serta seluruh masyarakat Desa Poleonro Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, 5 Agustus 2018

Penulis

Aulia Mukti Tama



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kerangka Teori	10
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	10
2.1.2 Penganggaran Partisipatif	15
2.1.3 <i>Budgetary Slack</i>	18
2.1.4 Asimetri Informasi	22
2.2 Kerangka Pikir	25
2.3 Hipotesis	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian	27

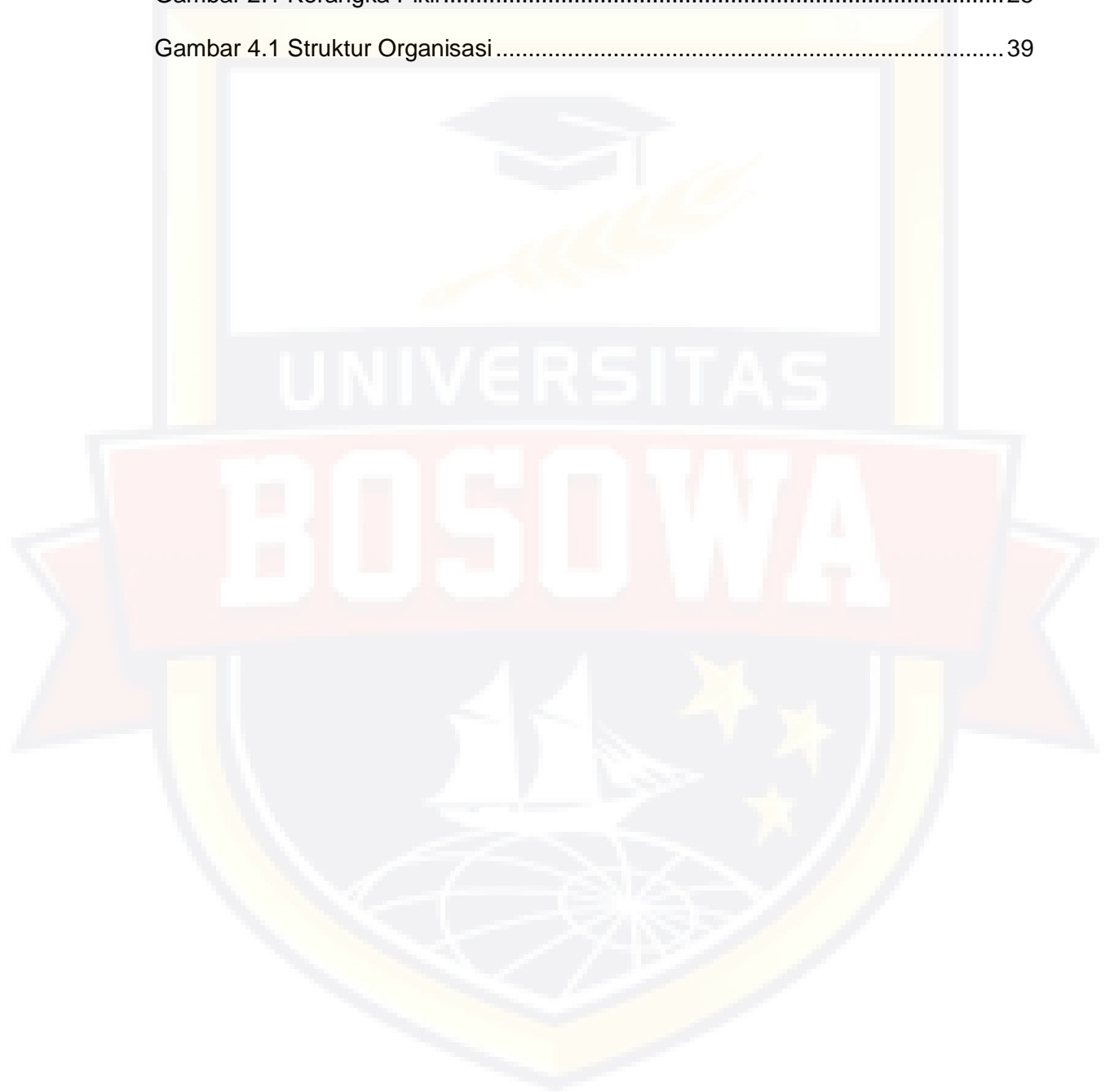
3.2 Metode Pengumpulan Data	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Metode Analisis Data	28
3.5 Definisi Operasional	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan	30
4.1.1 Geografi Provinsi Sulawesi Selatan	30
4.1.2 Sosial Kemasyarakatan.....	31
4.1.3 Visi Misi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.....	37
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Sulawesi Selatan.....	38
4.1.5 Uraian Tugas Pemerintahan Provinsi SulSel.....	39
4.2 Deskripsi Data.....	49
4.2.1 Karakteristik Umum Koresponden	49
4.2.2 Analisis Deskriptif Karakteristik Variabel.....	54
4.3 Analisis Regresi Sederhana	65
4.3.1 Pengujian Hipotesis.....	67
4.3.2 Koefisien Determinasi (R ²)	68
4.4 Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	39



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Wilayah Administrasi	36
Tabel 4.2 Presentase Responden Berdasarkan Instansi.....	50
Tabel 4.3 Deskripsi Responden.....	51
Tabel 4.4 Kategori Penilaian.....	55
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Asimetri Informasi.....	56
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel <i>Budgetary Slack</i>	62
Tabel 4.7 Hasil Olah Data Regresi oleh SPSS	66
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Parsial Uji-t	67
Tabel 4.9 Nilai Koefisien Determinasi (R ²)	68
Tabel 4.10 Interpretasi Nilai Korelasi.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manajemen pasti selalu ingin organisasi yang mereka kelola mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi, anggota individu dalam organisasi mungkin mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Organisasi akan kesulitan berkembang jika tidak ada keselarasan tujuan dalam tubuh organisasi. Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk dapat menyelaraskan tujuan tersebut dengan pengendalian manajemen yang baik. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya *goal congruence* organisasi yang tinggi. Individu diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang sekaligus juga merupakan kepentingan organisasi.

Dalam melaksanakan pengendalian manajemen yang berkaitan dengan penyelarasan tujuan tersebut, organisasi dapat menggunakan sistem pengendalian yang bersifat formal seperti penyusunan anggaran. Anthony dan Govindarajan (2017:381) menyatakan bahwa anggaran adalah sesuatu yang penting sebagai perencanaan dan pengendalian dalam jangka pendek secara efektif dalam organisasi. Anggaran merupakan suatu cara untuk mengkomunikasikan rencana, mengalokasikan sumber daya, menentukan tujuan dan sasaran, dan berfungsi sebagai acuan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, melalui anggaran pihak-pihak penyusun anggaran akan lebih bertanggung jawab dalam tugasnya. Anggaran penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak hanya suatu rencana keuangan yang

menetapkan biaya dan pendapatan, tetapi juga sebagai kontrol, komunikasi, koordinasi, evaluasi kinerja, dan motivasi.

Anggaran disusun agar manajer dapat menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien. Demikian halnya dalam proses penyusunan anggaran tersebut juga harus dibuat secara efektif dan efisien. Anggaran yang dibuat secara efektif akan berpengaruh pada tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan keefisienan anggaran berkorelasi terhadap tepatnya pengeluaran biaya yang dikeluarkan organisasi dalam suatu anggaran atau dengan kata lain tidak ada pemborosan di dalam anggaran. Proses penganggaran dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti *Top down*, *Bottom Up*, dan Campuran. Seperti yang dikemukakan Anthony dan Govindarajan (2008) yang mengatakan bahwa, proses penyusunan anggaran bisa bersifat dari “atas-ke-bawah” atau dari “bawah-ke-atas”, yang terakhir disebut penganggaran partisipatif. Proses penganggaran dengan metode campuran ini dikenal juga dengan metode partisipatif, dimana semua lini terlibat dalam menyusun anggaran. Definisi yang lebih rinci diberikan oleh Indriantono (1999) yang mengatakan bahwa keterlibatan adalah suatu proses yang individu-individu di dalamnya terlibat dan mempunyai pengaruh atas penyusunan target anggaran, yang kinerjanya akan dievaluasi, dan mungkin dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka. Proses penyusunan anggaran partisipatif seringkali memungkinkan manajemen puncak untuk lebih memahami masalah yang dihadapi oleh karyawan dan karyawan juga lebih dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh manajemen puncak (Blocher, 2007).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran dinilai dapat meningkatkan keoptimalan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi

pribadi tentang prospek masa depan, sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi dalam penyusunan anggaran dari para manajer akan dapat meningkatkan senjangan anggaran jika terdapat perbedaan informasi antara manajer bawah dan manajer atas yang tidak dikomunikasikan dengan baik.

Salah satu kendala dalam proses penyusunan anggaran adalah terjadinya *budgetary slack* (senjangan anggaran). *Budgetary slack* merupakan perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan. Anthony dan Govindarajan (2007:289) mengatakan bahwa *budgetary slack* sebagai perbedaan jumlah anggaran yang di ajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi terbaik dari organisasi. *Slack* dalam anggaran menciptakan bias terhadap anggaran dan dapat mengurangi keuntungan perusahaan, karena kesalahan perencanaan dan kompensasi yang lebih besar atau konsumsi penghasilan tambahan bagi manajer bawah. Penyusun anggaran menciptakan senjangan dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi. (Lukka, 1988, Stede, 2000) menyatakan dalam konteks penganggaran, *slack* (senjangan) dibangun dengan menetapkan target anggaran, sehingga mereka menjadi lebih mudah untuk mencapainya.

Budgetary slack ini dapat terjadi oleh beberapa alasan. Ada beberapa alasan manajer sebagai penyusun anggaran melakukan *budgetary slack*. Whitton (2009) memberikan pendapat bahwa ada tiga alasan pokok manajer melakukan senjangan, yaitu (1) *budgetary slack* akan membuat kinerja seolah terlihat lebih baik di mata pimpinan jika mereka dapat mencapai target anggaran, (2) *budgetary slack* sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian

memprediksi masa yang akan datang, (3) pengalokasian sumberdaya akan dilakukan berdasarkan proyeksi anggaran biaya, sehingga senjangan membuatnya fleksibel. *Budgetary slack* akan mengakibatkan fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja manajer bawah menjadi tidak berfungsi dengan baik karena anggaran yang ditetapkan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari manajer bawah. Selain itu, masalah yang lebih besar yang akan terjadi adalah *budgetary slack* mempengaruhi penyusunan anggaran periode selanjutnya. Secara berkelanjutan, anggaran yang tidak optimal pada periode sebelumnya akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran periode selanjutnya. Terlebih ketika organisasi tersebut menggunakan pendekatan anggaran tradisional, dimana cara penyusunan anggaran berdasarkan *incrementalism* yang berarti hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Bazerman dalam Koroy (2008) menyebutkan bahwa manajer seringkali mempunyai kesulitan dalam memisahkan keputusan yang diambil sebelumnya dengan keputusan yang berhubungan ke masa depan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Stevens (2002) yang meneliti mengenai peningkatan *budgetary slack* seiring dengan tahun periode anggaran.

Fenomena *budgetary slack* dalam dunia nyata sering terjadi dan menimbulkan masalah serta kerugian yang besar terhadap organisasi. Salah satu contohnya adalah tentang masalah penyusunan RAPBD tahun 2015 Provinsi Sulawesi Selatan Revitalisasi Fort Rotterdam, Penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam sejumlah pekerjaan yang dianggarkan sebesar Rp

24,3 miliar pada 2015. Diduga terdapat pengurangan volume pada penggantian atap dan konstruksi bangunan. Indikasinya ada dugaan kesenjangan anggaran (*Budgetary Slack*). Fort Rotterdam direncanakan direvitalisasi tiga tahap. Pada tahap pertama 2011, lokasi bersejarah itu telah menelan anggaran Rp 9 miliar. Alokasinya untuk pemugaran bagian dalam gedung seperti meremajakan kayu dan pengecatan. Pada tahap kedua 2012, Fort Rotterdam mendapat Rp 24,3 miliar untuk kepentingan konstruksi bangunan, pembuatan kanal samping kiri benteng, dan pembuatan taman. Anggaran tersebut digelontorkan dengan menggunakan dana dari pusat. Untuk tahap ketiga tahun 2014, pemerintah (Eksekutif) provinsi kembali mengusulkan untuk perampungan revitalisasi. Negara telah mengucurkan Rp10 miliar guna relokasi gedung RRI dan pembangunan kanal sisi kanan benteng. (Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel, Nur Alim Rachim).

Selain yang dilakukan oleh Eksekutif juga terdapat kesenjangan anggaran (*Budgetary Slack*) yang dilakukan oleh Legislatif (DPRD) Sulawesi Selatan. Kasus dugaan *Budgetary Slack* di DPRD Sulsel menjadi pembicaraan hangat selama tiga bulan terakhir ini. Modus penggunaan uang itu, seperti juga di banyak kasus di daerah-daerah lain, adalah dengan cara menambah (pengelembungan) APBD Tahun 2003, khususnya di pos anggaran DPRD Sulsel. Ada kejangalan dalam penyusunan anggaran itu. Misalnya saja, ada anggaran tunjangan tambahan penghasilan untuk anggota DPRD yang semula Rp 4,81 miliar dinaikkan menjadi Rp 11,4 miliar di dalam revisi. Padahal, di dalam PP No 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, istilah tunjangan tambahan penghasilan itu tidak ada. Dalam PP tersebut hanya ada enam jenis penghasilan, yaitu uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, komisi

khusus, dan tunjangan perbaikan penghasilan. Keanehan lain adalah adanya pos anggaran yang semestinya masuk ke Sekwan ternyata dialihkan ke pos anggaran DPRD, Jumlahnya pun ditambah. Misalnya, anggaran biaya operasional komisi sebesar Rp 150 juta yang ada di Sekwan digeser ke anggaran DPRD menjadi biaya operasional komisi-komisi dengan jumlah Rp 900 juta (naik 500 persen). Tunjangan operasional pengawasan/evaluasi APBD yang semula di Sekwan hanya Rp 562,5 juta, ketika digeser ke anggaran DPRD jumlahnya menjadi Rp 1,6 miliar (naik 200 persen). (Koordinator Anti-Corruption Committee (ACC) Abraham Samad).

Mengingat buruknya dampak yang diakibatkan oleh adanya *budgetary slack*, maka dalam penelitian ini akan ditelaah lebih lanjut mengenai *budgetary slack* dengan menggunakan variabel-variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi *budgetary slack*. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *budgetary slack* sehingga faktor-faktor tersebut dapat dikurangi atau diminimalisasi agar tidak menimbulkan *budgetary slack*.

Teori keagenan (*agency theory*) memberikan penjelasan mengenai fenomena *budgetary slack* di dalam penyusunan penganggaran partisipatif. Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara *agen* (dalam hal ini merupakan manajer tingkat bawah) dan *principal* (dalam hal ini merupakan manajer puncak). Erni (2015) menjelaskan bahwa di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Sama halnya dalam konteks penganggaran partisipatif yang berisi hubungan

antara manajer puncak yang memberikan wewenang kepada para manajer bawah untuk berpartisipasi menyusun anggaran. Namun pemberian wewenang ini tidak jarang dapat memunculkan kondisi asimetri informasi dimana manajer bawah lebih mengetahui informasi lokal di pusat-pusat tanggung jawab yang mereka kelola daripada manajer atas. Karena kepentingan pribadi, manajer bawah dengan sengaja menciptakan bias terhadap informasi kebutuhan anggaran sehingga menimbulkan senjangan anggaran. Seperti yang diutarakan Anthony & Govindarajan (2005), prinsipal memiliki kepentingan untuk terus mengembangkan perusahaannya, sedangkan agen memiliki kepentingan pribadinya sendiri.

Manajer puncak mengharapkan ketersediaan informasi yang kompleks untuk estimasi terbaik pada anggaran yang akan disusun. Karena keterbatasan informasi yang dimiliki, maka manajer puncak memberikan kesempatan pada manajer tingkat bawah untuk menunjukkan kinerjanya dengan memberikan informasi terkait keadaan kebutuhan dari pusat tanggung jawab masing-masing manajer. Hal itu dilakukan karena penyusunan anggaran tidak mungkin menjadi optimal ketika masih terdapat kesenjangan informasi yang dimiliki antara manajer puncak dengan manajer dibawahnya. Walaupun begitu, adanya asimetri informasi dimanfaatkan oleh manajer bawah untuk menciptakan *budgetary slack* karena perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer atas dengan manajer bawah dimana manajer bawah memiliki informasi yang lebih baik dan manajer puncak tidak mampu mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajer benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau telah terjadi kelalaian tugas (*incentive to shirk*) dimana manajer sengaja mengecilkan anggaran untuk insentif yang lebih besar. Hal ini didukung oleh

pernyataan Douglas & Wier (2011) yang menyatakan bahwa manajer bawah akan memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan *budgetary slack* jika terdapat insentif.

Penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap *budgetary slack* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Falikhatun (2017) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap *budgetary slack*, yaitu dapat mengurangi *budgetary slack*. Hal ini terjadi karena bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat. sedangkan menurut Elfi Rahmawati (2013) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap *budgetary slack*, dengan kata lain mengemukakan pendapat yang berbeda dari peneliti sebelumnya.

Adanya perbedaan hasil atas penelitian di atas menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak serta merta dapat mempengaruhi *budgetary slack*. Terdapat faktor lain yang memungkinkan para penyusun anggaran enggan melakukan *budgetary slack* walaupun berada dalam kondisi asimetri informasi yang semestinya dapat dimanfaatkan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu penyebabnya adalah faktor individu, yang didukung oleh pendapat Dunk (1996) yang mengemukakan bahwa penyebab *budgetary slack* tidak hanya asimetri informasi, tetapi juga karena faktor internal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh asimetri informasi terhadap *budgetary slack*. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “**Analisis Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *budgetary slack* pada Penganggaran Partisipatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *budgetary slack* pada penganggaran partisipatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan teori mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran (*Budgetary Slack*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktik penganggaran partisipatif terhadap adanya *budgetary slack* dari pengaruh asimetri informasi penganggaran partisipatif terhadap kecenderungan melonggarkan anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum untuk mendukung reformasi penganggaran daerah. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah, Permendagri No.13/2006, Peraturan Pemerintah No.58/2005, dan Permendagri No.37/2012 sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lembaga-lembaga yang berperan penting dalam perencanaan dan penganggaran daerah berdasarkan UU.No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU.No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Gubernur/Kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan praktek-praktek penyimpangan pengelolaan keuangan Negara. Salah satu penanggulangan yang dilakukan pemerintah pusat adalah memperbaiki sistem keuangan Negara dengan menerapkan sistem penganggaran yang disebut dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan proses penyusunan APBD di organisasi sektor publik untuk tatakelola pemerintahan, yakni proses pembangunan yang efisien dan partisipatif, serta terjadi reformasi anggaran, yaitu penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budget system*) untuk menggantikan sistem anggaran tradisional (*traditional*

budget system). Proses pembangunan ini melibatkan pengambilan kebijakan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dan dalam tahap tertentu melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Salah satu kunci utama penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah penentuan kinerja, adanya ukuran kinerja yang jelas dan dapat diverifikasi terhadap *outcome*, *output* maupun kewajaran dana yang dikeluarkan dengan output yang dicapai (Mahsun, dkk.,2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Permendagri No.37/2012 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran daerah meliputi masa satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Prinsip penyusunan APBD berdasarkan pada Permendagri No.37/2012 adalah:

- 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 2) APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal;
- 3) Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, yaitu memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang APBD
- 4) Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat;
- 5) APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
- 6) Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

A. Pengertian Anggaran

Anggaran erat hubungannya dengan kinerja perusahaan yang akan dicapai di masa depan, yang merupakan salah satu wujud implementasi dari perencanaan yang sudah ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. Maka dari itu, pihak-pihak penyusun anggaran memerlukan pemahaman yang baik tentang anggaran dalam rangka penyusunan anggaran. Anthony dan Govindarajan (2005) mendefinisikan anggaran adalah sebagai sebuah rencana keuangan (biasanya mencakup periode satu tahun) dan merupakan alat - alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi. Sedangkan Mulyadi (2011) menjelaskan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (programing). Menurut Hansen dan Mowen (2009): *"A key component of planning, budget are financial plans for the future; they identify objectives and the actions needed to achieve them"*. Menurut Rudianto (2011), anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Dari beberapa definisi tentang anggaran tersebut, maka anggaran dapat disimpulkan sebagai suatu perencanaan manajerial dimasa mendatang dan bersifat jangka pendek untuk digunakan sebagai pengendalian organisasi yang dituangkan dalam istilah angka atau keuangan.

B. Ciri-ciri Anggaran

Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Karena, anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana (Rudianto, 2009).

- 1) Dinyatakan dalam satuan moneter.

Penulisan dalam satuan moneter bertujuan untuk membaca dan usaha untuk mengerti rencana tersebut. Sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas.

- 2) Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun.

Hal di atas bermakna, bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek atau kurun waktu lebih panjang, seperti lima tahunan. Batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut.

- 3) Mengandung komitmen manajemen.

Dalam menyusun anggaran, organisasi harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, disertai dengan upaya untuk mencapainya.

- 4) Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi daripada pelaksana anggaran.

Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun.

- 5) Setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus.

Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal organisasi memaksa untuk mengubah anggaran tersebut, karena jika dipertahankan justru akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.

- 6) Jika terjadi penyimpangan/varians didalam pelaksanaannya, harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Analisis penyimpangan bertujuan untuk mencari penyebab penyimpangan, supaya tidak terulang kembali di masa mendatang dan penyusunan anggaran di kemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada.

C. Manfaat Anggaran

Menurut Hansen & Mowen (2016), manfaat anggaran sebagai berikut:

- 1) Memaksa manajer melakukan perencanaan
Dalam rangka menyusun anggaran, maka manajer bawah harus melakukan perencanaan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan perusahaan di masa depan.
- 2) Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan
Anggaran digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan berdasarkan hasil realisasi anggaran. Jika realisasi anggaran kurang memuaskan maka akan dilakukan perbaikan mengenai keputusan yang akan diambil selanjutnya.
- 3) Mengevaluasi kinerja
Anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran. Jika terdapat perbedaan yang menyimpang maka akan ditindak lanjuti.
- 4) Memperbaiki komunikasi dan koordinasi
Anggaran mencakup semua unit fungsional di perusahaan, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi dalam menyusun anggaran sehingga selaras dengan tujuan perusahaan.

D. Tujuan Anggaran

Ada beberapa tujuan disusunnya anggaran. Menurut Nafarin (2009), tujuan disusunnya anggaran antara lain:

- 1) Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana.
- 2) Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- 3) Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- 4) Merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 5) Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas nyata dan terlihat.
- 6) Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

E. Kelemahan Anggaran

Anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan anggaran menurut M. Nafarin (2017):

- 1) Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggaran, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- 2) Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.
- 3) Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif.

2.1.2 Penganggaran Partisipatif

A. Pengertian Penganggaran Partisipatif

Penganggaran Partisipasi merupakan proses dimana penyusun anggaran ikut terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan anggaran, Anthony dan Govindarajan (2015). Sedangkan menurut Chong (2012) dalam Ompusungu dan Banowo (2016), partisipasi anggaran adalah proses dimana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Menurut Mulyadi (2011) partisipasi anggaran berarti keikutsertaan *operating managers* dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan datang yang akan ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran.

Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para manajer di bawahnya akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk

mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan pemenuhan kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri para anggota organisasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen (Ikhsan dan Ishak, 2015).

Dalam organisasi besar dan birokrasi yang dikelola secara sentral, partisipasi dalam menentukan tujuan dan menetapkan sasaran akan berdasarkan definisi terbatas pada kelompok eksekutif puncak. Manajemen puncak akan menyusun anggaran dan meneruskannya ke bawah hierarki sebagai sekelompok perintah yang harus dipatuhi. Anggaran akan digunakan baik sebagai mekanisme untuk menginformasikan manajer tingkat bawah mengenai apa yang ingin dicapai oleh manajemen puncak maupun sebagai alat untuk mengendalikan pengeluaran orang dan memotivasi kinerja yang optimum (Ikhsan dan Ishak, 2015).

B. Manfaat Penganggaran Partisipatif

Penerapan Penganggaran Partisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan banyak manfaat antara lain (Siegel dan Marconi, 1989):

- 1) Partisipan (orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi *ego-involved* tidak hanya *task-involved* dalam kerja mereka.
- 2) Partisipasi akan menaikkan kebersamaan dalam kelompok, yang akibatnya akan menaikkan kerja sama anggota kelompok dalam penerapan sasaran.
- 3) Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan akibat adanya anggaran.
- 4) Partisipasi dapat mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi sumber daya di antara bagian-bagian organisasi.

Menurut Welch (2010) partisipasi manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dalam proses pembuatan anggaran mempunyai dampak yang bermanfaat paling tidak dalam dua cara yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pembuatan anggaran merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen puncak untuk mendengarkan informasi yang disimpan secara pribadi oleh para manajer yang lebih rendah. Ketimpangan informasi antara berbagai tindakan manajemen dapat menjadi rintangan untuk pembentukan program insentif dan efektif.
- 2) Partisipasi dalam pembuatan anggaran sering menimbulkan tingkat komitmen yang lebih besar dari manajer yang lebih rendah terhadap pencapaian sasaran yang terdapat dalam anggaran. Walaupun partisipasi pada umumnya baik dalam sebagian besar situasi, tetapi ada faktor budaya, organisasi dan kepribadian yang penting dalam menentukan efektifitas keseluruhan partisipasi dalam pembuatan anggaran.

C. Masalah dalam Penganggaran Partisipatif

Penyusunan anggaran secara partisipatif selain memiliki sisi positif dari banyaknya manfaat yang ditimbulkan, juga dapat menimbulkan beberapa masalah. Menurut Hansen & Mowen (2006), anggaran partisipatif memiliki tiga potensi masalah, antara lain:

- 1) Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah beberapa manajer bawah mungkin cenderung membuat anggaran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika anggaran terlalu tinggi maka akan membuat manajer bawah kesulitan untuk mencapai target anggaran sehingga akan menimbulkan rasa frustrasi pada manajer bawah yang mengakibatkan penurunan kinerja manajer bawah. Jika anggaran terlalu rendah atau mudah akan membuat manajer bawah kehilangan minat untuk melaksanakan anggaran yang mengakibatkan penurunan kinerja.
- 2) *Budgetary slack*
Partisipasi anggaran membuat manajer bawah memiliki kesempatan untuk melakukan senjangan anggaran. Manajer bawah melakukan senjangan anggaran dengan meninggikan biaya atau merendahkan pendapatan sehingga manajer bawah dapat lebih mudah dalam mencapai target anggaran dan juga untuk memperkecil risiko yang akan dihadapi manajer bawah.
- 3) Partisipasi semu
Partisipasi semu muncul ketika manajer bawah tidak benar-benar berpartisipasi dalam anggaran. Manajer atas hanya mendapatkan persetujuan formal anggaran dari manajer bawah bukan pendapat dan informasi dari manajer bawah.

D. Indikator PenganggaranPartisipatif

Menurut Dewi (2013) ada 5 (lima) indikator partisipatif penganggaran yang terdiri dari:

- a) Keterlibatan dalam penyusunan anggaran,
- b) Frekuensi saran dalam anggaran,
- c) Banyaknya pengaruh yang diberikan,
- d) Pentingnya kontribusi, dan
- e) Frekuensi opini yang diberikan.

Sedangkan Soobaroyen (2005) menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dapat dilihat dari indikator yaitu:

- a) Keikutsertaan penyusunan anggaran.
- b) Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran
- c) Kebutuhan memberikan pendapat

2.1.3 *Budgetary Slack*

A. Pengertian Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*)

Anthony dan Govindarajan, (2008), Senjangan anggaran (*budgetary slack*) adalah perbedaan antara jumlah anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan. Tiga alasan utama manajer melakukan *budgetary slack* :

- (a) orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya;
- (b) *budgetary slack* selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat melampaui/ mencapai anggarannya;
- (c) rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya.

Schiff dan Lewin (1970) dalam Falikhatun (2007) menyatakan bahwa partisipatif Penganggaran menciptakan *budgetary slack* karena dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pribadi sehingga akan memudahkan pencapaian

target anggaran, terutama jika penilaian kinerja organisasi ditentukan berdasarkan pencapaian anggaran.

Senjangan anggaran (*budgetary slack*) merupakan kendala yang paling sering muncul dalam suatu proses penyusunan anggaran, yang mengakibatkan hilangnya estimasi terbaik dari anggaran itu sendiri yang berpengaruh pada kinerja suatu organisasi. Beberapa definisi menjelaskan tentang *budgetary slack*, seperti yang dikemukakan Siegel(1989) berikut ini:

"Slack is difference between resources that are actually necessary to efficiently complete a task and the larger amount of resources that are earmarked for the task"

"Budgetary slack exist whenever a manager deliberately under estimates revenues or over estimates costs. Either approach increases the likelihood of the budget being achieved by the manager, and consequently reduce the risk that manager also faces".

Pendapat lain dikemukakan oleh Darlis (2002) yang berpendapat bahwa *budgetary slack* merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika dia diberi kesempatan untuk menentukan standar kinerjanya. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa para manajer menciptakan *slack* dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi, hal ini dilakukan agar target anggaran dapat dicapai sehingga kinerja pimpinan terlihat baik. Motif manajer bawahan melakukan senjangan ini adalah memuat *margin of safety* dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan. Dengan cara tersebut, manajer bawahan berharap dapat menghilangkan tekanan dan rasa frustrasi dalam upaya mewujudkan target anggaran akibat anggaran yang terlalu ketat.

B. Indikator *Budgetary Slack*

Onsi (1973) dalam Asrininggati (2016) Ada empat Indikator Senjangan Anggaran(*budgetary slack*) yaitu :

- a. Perbedaan jumlah anggaran yang dinyatakan dengan estimasi terbaik.
- b. Kelonggaran dalam anggaran.
- c. Standar anggaran.
- d. Keinginan untuk mencapai target.

Selanjutnya Dewi (2016) menyatakan ada tiga indikator dalam senjangan anggaran (*budgetary slack*) yaitu :

- 1) Perbedaan jumlah anggaran dengan estimasi terbaik
Estimasi yang dimaksud adalah anggaran yang sesungguhnya terjadi dan sesuai dengan kemampuan terbaik perusahaan. dalam keadaan terjadinya senjangan anggaran, bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan meninggikan biaya dibandingkan dengan estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target mudah dicapai.
- 2) Target Anggaran
Bawahan menciptakan senjangan anggaran karena dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pribadi sehingga akan memudahkan pencapaian target anggaran, terutama jika penilaian prestasi manajer ditentukan berdasarkan pencapaian anggaran, dengan target anggaran yang rendah dan biaya yang dianggarkan juga tinggi menyebabkan seorang manajer dapat dengan mudah mencapai anggaran yang telah disetujui sebelumnya.
- 3) Kondisi lingkungan
Kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi *budgetary slack* diantaranya dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat suai timbal balik seperti gaji, promosi, dan bonus dari organisasi karena anggaran yang dibuat dapat dicapai. *Budgetary slack* dapat dilakukan manajer karena dianggap perlu untuk menyelamatkan anggaran dengan melakukan penyesuaian dengan bawahan. Oleh karena karakter dan perilaku manusia yang berbeda-beda, partisipasi penganggaran dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

C. Sebab Terjadinya *Budgetary Slack*

Budgetary slack dapat terjadi oleh beberapa alasan. Samad (2009) berpendapat ada tiga alasan manajer melakukan senjangan anggaran yaitu:

- 1) Senjangan anggaran akan membuat kinerja seolah terlihat lebih baik di mata pimpinan jika mereka dapat mencapai target anggaran.
- 2) Senjangan anggaran sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian memprediksi masa yang akan datang.
- 3) Pengalokasian sumberdaya akan dilakukan berdasarkan proyeksi anggaran biaya, sehingga senjangan membuatnya fleksibel.

D. Dampak *Budgetary Slack*

Senjangan anggaran (*budgetary slack*) dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan kerugian pada organisasi dari sisi finansial yang organisasi keluarkan untuk anggaran biaya maupun sisi finansial organisasi dari prospek keuntungan di masa mendatang karena kesalahan perencanaan kebutuhan anggaran yang tidak merepresentasikan kebutuhan yang sesungguhnya. Abdullah (2012) menjelaskan bahwa *budgetary slack* dapat mengakibatkan pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak efisien, anggaran yang ditetapkan menjadi tidak efektif, dan fungsi anggaran sebagai alat menilai kinerja manajer bawah menjadi tidak berfungsi dengan baik karena anggaran yang ditetapkan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari manajer bawah. Anggaran juga dapat menyebabkan suatu organisasi kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba optimal serta tidak mengarah pada penghematan pengeluaran biaya.

Budgetary slack dapat terjadi secara berkelanjutan dan mempengaruhi penyusunan anggaran periode selanjutnya. *Budgetary slack* akan meningkat seiring dengan tahun periode anggaran (Stevens, 2002). Hal ini terjadi ketika organisasi menggunakan pendekatan anggaran tradisional dimana cara penyusunan anggaran berdasarkan *incrementalism* yang berarti hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

2.1.4 Asimetri Informasi

A. Pengertian Asimetri Informasi

Dalam ilmu ekonomi dikenal suatu keadaan atau kondisi yang dinamakan asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi. Anthony dan Govindarajan (2015) menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yakni *principal* (atasan) memberikan wewenang kepada *agent* (bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimiliki. Karena pendelegasian wewenang serta pemisahan tugas dari *principal* (atasan) kepada *agent* (bawahan), maka atasan tidak selalu dapat mengetahui aktivitas aktual yang dilakukan oleh bawahannya serta keterbatasan informasi tentang keadaan faktual dari unit atau pusat tanggung jawab yang dikelola oleh bawahan. Kondisi tersebut yang kemudian menyebabkan suatu fenomena yang dinamakan asimetri informasi.

Asimetri informasi menurut Dunk (1983): *"Information asymmetry exists only when subordinates' information exceeds that of their superiors"*. Asimetri informasi terjadi karena adanya pihak (*agent*) yang mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak yang lain yang dalam hal ini berarti *principal*.

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Pengertian asimetri informasi menurut Scoot (2009:105) sebagai berikut :

"Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the another type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry"

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan

kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain. Menurut Jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu: "Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki".

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan dengan informasi yang dimiliki atasan mengenai suatu unit tanggung jawab pada sebuah organisasi.

B. Jenis Asimetri Informasi

Menurut Scott (2010), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

- 1) *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
- 2) *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

C. Faktor Pendorong Asimetri Informasi

Menurut Ompusunggu dan Buwana (2016), menyatakan bahwa Informasi yang tidak disampaikan sepenuhnya kepada atasan (pemegang kuasa anggaran) menjadi nilai lebih bagi bawahan (pelaksana anggaran), dalam artian bahwa bawahan memiliki kelebihan informasi meskipun telah dilakukan proses partisipasi dalam penyusunan anggaran, namun tidak semua informasi yang dimiliki oleh bawahan disampaikan dalam proses tersebut.

Dari pendapar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak akurat dan mengesampingkan keadaan aktual yang sebenarnya terutama jika

informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja dimana manajer bisa secara fleksibel untuk melakukan manajemen laba.

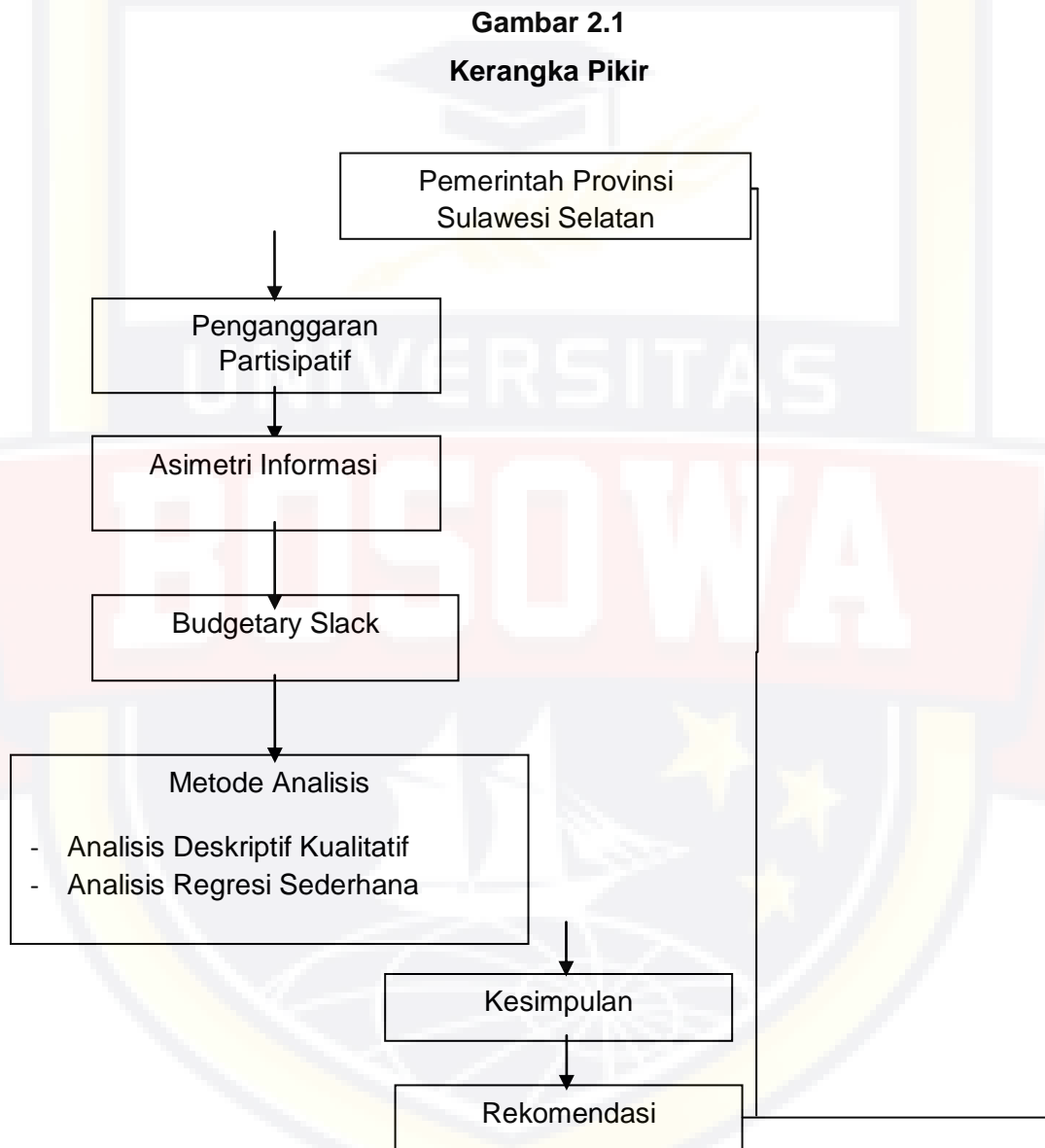
D. Indikator Asimetri Informasi

Menurut Dunk (2013) asimetri informasi diukur dengan beberapa indikator yaitu:

- 1) Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan Asimetri informasi ditandai dengan perbedaan informasi yang dimiliki manajer atas dengan manajer bawah. Manajer bawah seringkali memiliki informasi yang lebih banyak mengenai unit tanggung jawabnya daripada manajer atas. Hal tersebut karena manajer bawah terlibat langsung dalam pengoperasian unit tanggung jawab yang di bawahinya.
- 2) Hubungan *input-output* yang ada dalam operasi internal Manajer bawah lebih mengetahui berapa jumlah pendapatan dengan pengeluaran dalam kegiatan operasi unit tanggung jawab yang mereka kelola.
- 3) Kinerja potensial
Karena manajer bawah terlibat langsung dalam proses pengoperasian unit tanggung jawabnya maka manajer bawah dapat memperkirakan kinerja potensial unit tanggung jawabnya lebih baik daripada manajer atas yang tidak terlibat langsung.
- 4) Teknis pekerjaan
Manajer bawah lebih mengetahui bagaimana cara unit tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan daripada manajer atas.
- 5) Mampu menilai dampak potensial
Manajer bawah terlibat langsung dalam proses pengoperasian unit tanggung jawabnya maka manajer bawah lebih dapat menilai risiko yang mungkin terjadi pada operasional unit tanggung jawabnya.
- 6) Pencapaian bidang kegiatan
Manajer bawah lebih mengetahui bagaimana unit tanggung jawabnya dapat memenuhi pencapaian atas perencanaan yang sudah ditetapkan.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah :

“Diduga bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap *budgetary slack* pada Penganggaran Partisipatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 13 SKPD Sulawesi Selatan yang beralamat di Makassar. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada bulan Juni sampai bulan Juli 2018.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini melalui beberapa cara, yaitu:

1. Data primer diperoleh dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung rapat anggaran sehingga dapat diperoleh gambaran yang nyata dari keadaan penyusunan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Wawancara atau *interview*, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan beberapa penganggaran Partisipatif yang memiliki informasi yang diperlukan.
 - c. Angket atau Kuesioener yaitu membagikan daftar pertanyaan kepada sampel penelitian.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara:
 - a. Proses membaca
 - b. Penelitian terdahulu
 - c. Mempelajari dan mengambil keterangan yang diperlukan dari buku

- d. Bahan-bahan kuliah serta sumber-sumber data yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber datanya berasal dari data primer, dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, kuesioner yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait dalam topik penelitian, sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur.

3.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif :

1. Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan asimetri informasi dan *budgetary slack* secara deskriptif yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, keadaan responden dan sejarah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Responden tersebut yang disajikan pada aspek-aspek non finansial dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, bagan, atau gambar untuk mempermudah pemahaman.
2. Analisis Regresi Sederhana. Data kuantitatif dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Budgetary Slack dengan menggunakan Regresi Sederhana seperti rumus di bawah ini :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Budgetary Slack

X = Asimetri Informasi

a = Konstanta

b = Koefisien regresi yang dicari

3.5. Definisi Operasional

1. *Budgetary slack* adalah perbedaan antara perencanaan anggaran yang diajukan dengan estimasi terbaik penganggaran partisipatif, atau bisa juga diartikan pengajuan target anggaran di bawah kemampuan kinerja organisasi.
2. Asimetri Informasi adalah adanya informasi yang tidak simetris diantara berbagai bagian dalam penyusunan anggaran.

BOSOWA

UNIVERSITAS

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Resmi	: Provinsi Sulawesi Selatan
Ibukota	: Makassar
Luas Wilayah	: 46.717,48 Km ² *)
Jumlah Penduduk	: 9.453.168 Jiwa *)
Suka Bangsa	: Makassar, Bugis, Mandar, Toraja
Agama	: Islam, Protestan, Katolik
Wilayah Administrasi	: Kab: 21, Kota: 3, Kec: 306, Kel: 785, Desa: 2.253 *)
Lagu Daerah	: Ma Rencong, Pakarena
Website	: http://www.sulselprov.go.id/

4.1.1 Geografi Provinsi Sulawesi Selatan

Letak wilayah Sulawesi Selatan 0o12' – 8' Lintang Selatan dan 116o48' – 122o36" Bujur Timur yang dibatasi sebelah Utara Sulawesi Barat, sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sebelah Barat Selat Makassar, sebelah Selatan Laut Flores.

Luas wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km² dengan jumlah penduduk tahun 2012 ± 8.214.779 Jiwa dengan kepadatan penduduk 175,84 Jiwa/km² yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304

kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.

5 tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi, 10 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. 4 tahun setelah itu, melalui UU Nomer 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.

4.1.2 Sosial Kemasyarakatan

1. Suku Bangsa

Masyarakat Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau ini. Diantaranya suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Masing-masing suku memiliki kebudayaan dan adat istiadat tersendiri.

2. Bahasa

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam, salah satunya adalah bahasa. Bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahasa Makassar merupakan salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan oleh etnik suku makassar, yang mendiami beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti Kota Makassar, Kab. Gowa dan Kab. Takalar. Bahasa ini mempunyai abjadnya sendiri, yang disebut Lontara, namun sekarang banyak juga ditulis dengan menggunakan huruf latin.

- b. Bahasa Bugis adalah salah satu dari rumpun bahasa Austronesia yang dipergunakan oleh etnik Bugis di Sulawesi Selatan, yang tersebar di Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kota Parepare, sebagian Kab. Enrekang, sebagian Kab. Majene, Kab. Luwu, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Bulukumba, dan Kab. Bantaeng. Namun yang membedakan bahasa bugis disetiap daerah terletak pada dialek dan pengucapan kata-katanya.
- c. Bahasa Toraja adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah Kabupaten Tana Toraja dan sekitarnya.
- d. Bahasa Mandar adalah bahasa suku Mandar, yang tinggal di provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Utara. Di samping di wilayah-wilayah inti suku ini, mereka juga tersebar di pesisir Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- e. Bahasa Pettae adalah salah satu bahasa yang dipertuturkan di daerah Tana Luwu, mulai dari Siwa, Kabupaten Wajo, Enrekang Duri, sampai ke Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
- f. Bahasa Duri adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia di Sulawesi Selatan yang masuk dalam kelompok dialek Massenrempulu. Di antara kelompok bahasa Toraja dan bahasa Tae' Luwu. Penuturnya tersebar di wilayah utara Gunung Bambapuang, Kabupaten Enrekang sampai wilayah perbatasan Tana Toraja.

- g. Bahasa Konjo terbagi dua yaitu Bahasa Konjo Pesisir dan Bahasa Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir tinggal di kawasan pesisir Bulukumba dan sekitarnya, di sudut tenggara bagian selatan pulau Sulawesi sedangkan Konjo pegunungan tinggal di kawasan tenggara Gunung Bawakaraeng.

3. Agama

Penduduk Sulawesi Selatan sebagian besar beragama Islam (86,63 persen), sedangkan selebihnya beragama Kristen (8,93), dan beragama lainnya (1,61 persen).

4. Budaya dan Adat Istiadat

Dalam budaya suku Bugis-Makassar atau masyarakat Sulawesi selatan pada umumnya. Terdapat tiga hal yang bisa memberikan gambaran tentang budaya dan adat istiadat orang Bugis-Makassar, yaitu konsep *ade*, *siri'* na *pesse*.

- a. Konsep *Ade* dalam bahasa Indonesia adalah adat istiadat merupakan serangkaian norma atau peraturan dalam masyarakat yang terkait satu sama lain. Misalnya tingkah laku yang baik ditengah masyarakat, keturunan masyarakat, dan penetapan hukum berdasarkan syariat islam.
- b. Konsep *Siri'* yaitu mengacu pada perasaan malu dan harga diri.
- c. *Konsap Pesse'* atau *Pacce* mengacu pada suatu kesadaran dan perasaan empati terhadap penderitaan yang dirasakan oleh setiap anggota masyarakat.

5. Pariwisata

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi pariwisata yang dianggap mampu untuk memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa potensi pariwisata diantaranya:

- a. Objek Wisata Alam diantaranya seperti Pulau Kayangan, Pantai Bira, Pantai Lumpus Goa Mampu, Pulau Lae lae, Pantai Takalar, dan Taman Nasional serta Pemandian Bantimurung, merupakan daerah yang memiliki potensi cukup besar untuk menarik minat pengunjung luar dan dalam negeri.
- b. Objek Wisata Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah yang dapat dikunjungi adalah Benteng Somba Opu, Benteng Port Rotterdam, Makam Raja-Raja Tallo, Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin, Keraton Raja Gowa, Makam Raja-Raja Bugis Watang Lamuru , Tana Toraja, dan banyak lagi keindahan budaya yang bisa ditemui di daerah ini.
- c. Objek wisata Adat dan Istiadat, yang bisa dinikmati para pelancong adalah Tana Toraja. Merupakan daerah wisata yang sangat unik, dengan tujuan wisata seperti makam para suku Toraja karena para jenazah disimpan di goa-goa batu yang tinggi. Wisata menarik lainnya adalah penguburan mayat Rambu Solo. Sebelum penyimpanan jenazah, dilakukan upacara adat yang sangat meriah yang berlangsung selama 2-6 hari dengan melakukan beberapa tradisi seperti tarian dan adu kerbau.
- d. Objek Wisata Hiburan dan Belanja yang dapat dikunjungi seperti Trans Studio Theme park, Pusat perbelanjaan (Mall) dan tradisional.

6. Makanan Tradisional

Sulawesi Selatan memiliki beberapa macam makan Tradisional yang enak dan menggugah selera, diantaranya.

- 
- a. Pisang Epe
 - b. Pisang Ijo
 - c. Bassang
 - d. Coto Makassar
 - e. Kapurung
 - f. Nasu Palekko
 - g. Roti Maros
 - h. Tenteng
 - i. Baje Bandong
 - j. Bipang
 - k. Benno
 - l. Baroncong
 - m. Sop Saudara
 - n. Barongko
 - o. Bandang-bandang
 - p. Sup Konro
 - q. Pallubasa

r. Pallu Butung

7. Wilayah Administrasi

Sulawesi Selatan memiliki wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Diantaranya sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Wilayah Administrasi

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)
1	Kabupaten Bantaeng	Bantaeng	395,83 km ²
2	Kabupaten Barru	Barru	1.174,71 km ²
3	Kabupaten Bone	Watampone	4.559 km ²
4	Kabupaten Bulukumba	Bulukumba	1.154,67 km ²
5	Kabupaten Enrekang	Enrekang	1.786,01 km ²
6	Kabupaten Gowa	Sungguminasa	1.883,32 km ²
7	Kabupaten Jeneponto	Bontosunggu	749,79 km ²
8	Kabupaten Kepulauan Selayar	Benteng	10.503,69 km ²
9	Kabupaten Luwu	Belopa	3.000,25 km ²
10	Kabupaten Luwu Timur	Malili	6.994,88 km ²
11	Kabupaten Luwu Utara	Masamba	7.502,58 km ²
12	Kabupaten Maros	Turikale	1.619,12 km ²
13	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pangkajene	1.236,27 km ²
14	Kabupaten Pinrang	Pinrang	1.961,77 km ²
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	Watang Sidenreng	2.509,16 km ²
16	Kabupaten Sinjai	Sinjai	819,96 km ²
17	Kabupaten Soppeng	Watansoppeng	1.359,44 km ²
18	Kabupaten Takalar	Patallasang	566,51 km ²
19	Kabupaten Tana Toraja	Makale	2.054,30 km ²
20	Kabupaten Toraja Utara	Rantepao	1.151,47 km ²
21	Kabupaten Wajo	Sengkang	2.056,20 km ²
22	Kota Makassar	Makassar	175,77 km ²
23	Kota Palopo	Palopo	247,52 km ²
24	Kota Parepare	Parepare	99,33 km ²

4.1.3 Visi Misi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Visi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018, merupakan gambaran sikap mental dan cara pandang jauh kedepan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi Sulawesi Selatan, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 adalah :
“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

2. Misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

- a. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- b. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
- d. Meningkatkan daya saing daerah dan sinegritas regional, nasional data global;
- e. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
- f. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa.
- g. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Struktur organisasi memegang saham penting dan tidak boleh diabaikan baik perusahaan swasta, negara, maupun departemen, atau lembaga-lembaga dalam mencapai tujuan perusahaan.

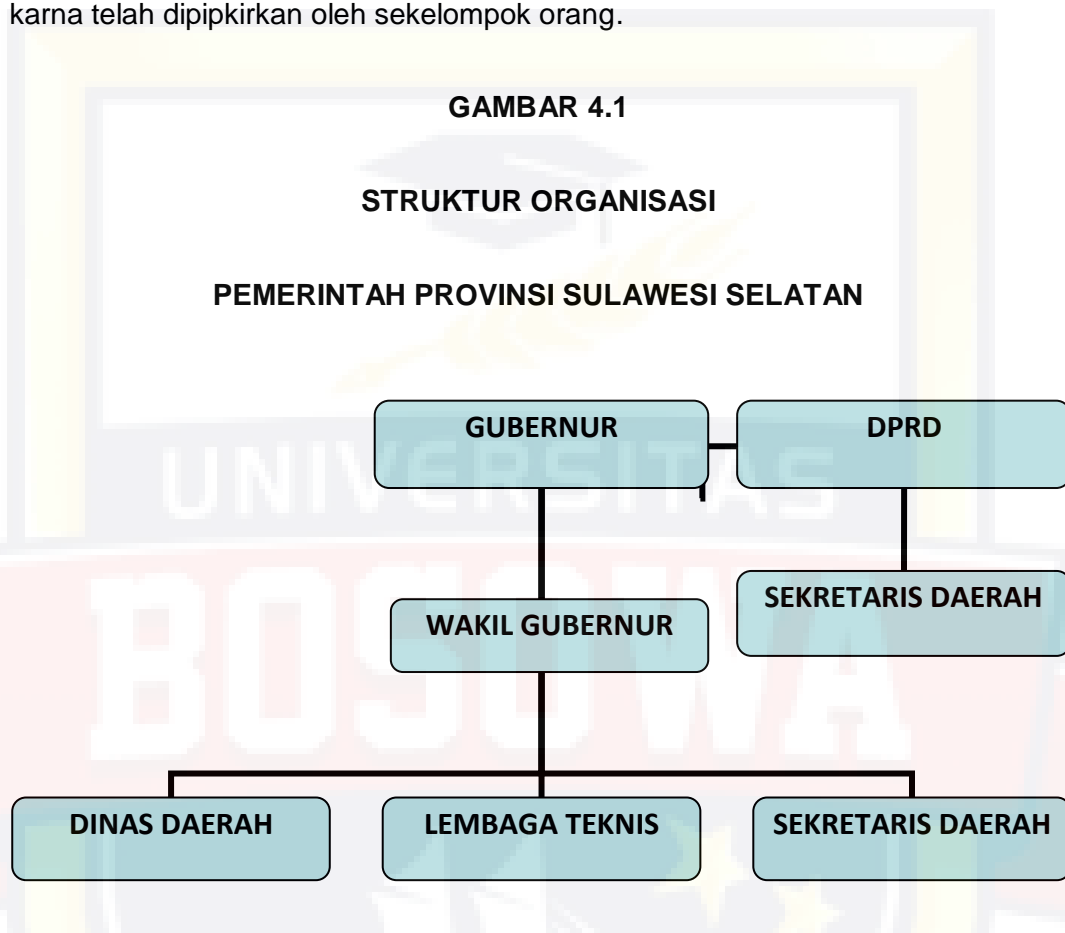
Struktur organisasi merupakan bagian atau kerangka yang terdiri dari bermacam-macam fungsi menurut pola tertentu yang menyatakan adanya urutan, peraturan, wewenang, dan tanggung jawab antara bagian yang ada dalam perusahaan tersebut.

Tanggung jawab yang saling bertentangan dalam pembagian tugas perlu dihindari, tetapi saling melengkapi dalam hal pekerjaan dari dua bagian atau lebih yang disesuaikan dengan pembagian tanggung jawab yang telah ditetapkan menurut pekerjaan masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang mungkin dapat timbul didalam perusahaan, selain itu struktur organisasi perusahaan juga disebut sebagai alat kontrol yang ditetapkan yang diharapkan dapat membantu peningkatan dinamika pendidikan.

Pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab dapat dibedakan dalam empat struktur organisasi diantaranya yaitu: bentuk organisasi garis/ lini, bentuk organisasi fungsional, bentuk organisasi garis dan staf, dan bentuk organisasi fungsional dan staf.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan bentuk Organisasi Garis dan Staf, dimana Staf hanya memberikan bantuan pemikiran, saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan,

sedangkan untuk menetapkan keputusan dan kebijaksanaan berada di tangan pimpinan. Keuntungan dari struktur organisasi ini yaitu keputusan bisa lebih baik karena telah dipikirkan oleh sekelompok orang.



4.1.5 Uraian Tugas Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Gubernur
 - a. Tugas Gubernur
 - 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPIMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan Gubernur

- 1) Mengajukan rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Gubernur

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi

- 4) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- 6) Melaksanakan program strategis nasional; dan
- 7) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

2. Wakil Gubernur

a. Tugas Wakil Gubernur

Berikut Tugas dari Wakil Gubernur (Wagub) Antara Lain adalah :

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah;
- 2) Membantu kepala daerah dalam megkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
- 3) Menindak lanjuti dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- 5) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

- 7) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- 8) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, wakil Gubernur daerah bertanggung jawab kepada Gubernur. Serta dapat menggantikan Gubernur sebelum habis masa jabatannya apabila Gubernur meninggal dunia, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

3. DPRD

a. Wewenang dan Tugas DPRD

DPRD Provinsi mempunyai wewenang dan tugas;

- 1) Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- 5) Memilih wakil gubernur dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi;
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Keanggotaan

anggota DPRD PROVINSI BERJUMLAH PALING SEDIKIT 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang

ditetapkan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

c. Hak DPRD

Hak DPRD provinsi adalah :

- 1) Hak interpelasi yaitu hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 2) Hak angket yaitu hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

d. Hak dan Kewajiban Anggota

- 1) Hak Anggota

Anggota DPRD provinsi berhak ;

- a) Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
- b) Mengajukan pernyataan;
- c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- d) Memilih dan dipilih;
- e) Membela diri;
- f) Imunitas;
- g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h) Protokol; dan
- i) Keuangan dan administratif.

2) Kewajiban Anggota

Anggota DPRD Provinsi berkewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g) Menaati tata tertib dan kode etik;
- h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;

- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

e. Fraksi

Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

f. Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- 1) Pimpinan;
- 2) Badan musyawarah;
- 3) Komisi;
- 4) Badan Legislatif Daerah;
- 5) Badan Anggaran;
- 6) Badan Kehormatan; dan
- 7) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

4. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD

Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.

5. Dinas Daerah

Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk melaksanakan kewenangan Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota, UPTD tersebut merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi.

Dinas Daerah Provinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 Dinas, dan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Provinsi.

6. Lembaga Teknis

Lembaga Teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Demikian pula untuk daerah kabupaten/kota, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota

melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk “Badan”, “ Kantor”, dan “Rumah Sakit”. Contoh lembaga teknis daerah adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat daerah provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi. Sekretaris Daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Sekretaris daerah dibantu oleh beberapa asisten. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 asisten, di mana asisten masing-masing terdiri dari 3 biro.

Sekretariat Daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina PNS di daerahnya. Sekretaris Daerah dapat disebut jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Karakteristik Umum Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian (Hair et al, 1995). Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian.

Dalam bagian penelitian ini diungkapkan karakteristik responden pegawai pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Karakteristik tersebut berupa identitas responden yang terjaring melalui penyebaran kuisisioner sebanyak 120 sampel. Kuisisioner tersebut mewakili karakteristik responden dan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Persentase Responden Berdasarkan Instansi pemerintahan

Distribusi persentase responden berdasarkan instansi pemerintahan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Distribusi Persentase Responden Berdasarkan Instansi pemerintahan

Instansi pemerintahan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Dinas Pendidikan	12	10
Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	10	8,34
Rumah Sakit Daerah Labuang Baji	10	8,34
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	10	8,34
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	10	8,34
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	10	8,34
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10	8,34
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	10	8,34
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8	6,67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	4,17
Badan Pendapatan Daerah	10	8,34
Badan Kepegawaian Daerah	10	8,34
Sekretariat DPRD	5	4,17
Jumlah	120	100

Sumber : Data diolah untuk kepentingan skripsi ini (2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berasal dari Dinas Pendidikan sebanyak 12 responden atau sebesar 3,870%, Rumah Sakit Umum Haji Makassar sebanyak 10 responden atau 8,34%, Rumah sakit Umum Daerah Labuang Baji sebanyak 10 responden atau 8,34%, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebanyak 10 responden atau 8,34%, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Kota sebanyak 10 responden atau 8,34%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebanyak 10 responden atau 8,34%, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebanyak 10 responden atau 8,34%, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sebanyak 10 responden atau 8,34%, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 8

responden atau 6,67%, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 5 responden atau 4,17%, Badan Pendapatan Daerah sebanyak 10 responden atau 8,34%, Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 10 responden atau 8,34%, Sekretariat DPRD sebanyak 5 orang atau 4,17%. Data tersebut menunjukkan dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berasal dari Dinas Pendidikan sebanyak 12 responden, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 5 responden, Rumah Sakit Umum Daerah Haji sebanyak 10 responden, Badan Pendapatan Daerah sebanyak 10 responden akan tetapi sebaran responden hampir merata karena jumlah penganggaran partisipatif di setiap SKPD hampir sama yakni Eselon II, III, dan IV, Bagian Program, dan Bagian Keuangan.

b. Karakteristik Deskripsi Responden

Berdasarkan data yang sudah terkumpul dari 120 kuisioner yang disebar, diperoleh informasi mengenai karakteristik responden berdasarkan umur, status, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama menduduki jabatan. Deskripsi responden disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Deskripsi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Usia/Umur		
≤ 30	30	25,0
31 – 40	35	29,2
41 – 50	30	25,0
> 50	25	20,8
Jumlah	120	100,00
Status		
Belum Kawin	25	20,8
Kawin	85	70,8
Janda/Duda	10	8,4
Jumlah	120	100,00
Jenis Kelamin		
Pria	75	62,5

Keterangan	Jumlah	Persentase
Wanita	45	37,5
Jumlah	120	100,00
Tingkat Pendidikan		
SMA	2	1,67
D3	8	6,67
S1	95	79,16
S2	11	9,16
S3	4	3,34
Jumlah	120	100,00
Lama menduduki jabatan		
< 5 Tahun	20	1,67
5 - 10 Tahun	85	7,08
> 10 Tahun	15	1,25
Jumlah	120	100,00

Sumber : Data diolah untuk kepentingan Skripsi ini (2018)

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah dan persentase usia responden di dalam penelitian. Dominan responden dalam penelitian ini memiliki rentang usia 31 - 40 tahun yaitu sebanyak sebanyak 35 responden atau 29,2% dari total responden yang berjumlah 120 responden. Responden terbanyak selanjutnya usia 41 - 50 tahun sebanyak 30 responden atau 25,00%, selanjutnya responden dengan usia ≤ 30 tahun sebanyak 30 responden atau 25,00%, responden dengan usia ≥ 50 tahun sebanyak 25 responden atau 20,8%. Usia responden sangat mempengaruhi produktivitasnya (Robbins, 2001).

Deskripsi responden berdasarkan status perkawinan di dalam penelitian ini, dominan responden memiliki status kawin sebanyak sebanyak 85 responden atau 70,8% dari total responden yang berjumlah 120 responden, responden yang belum menikah sebanyak 25 orang atau 20,8% sedangkan responden dengan status janda/duda sebanyak 10 responden atau 8,4%. Seorang yang sudah menikah berkenaan dengan pengendalian diri, tanggungjawab yang lebih luas khususnya kepada keluarga, perencanaan hidup yang lebih matang, manajemen keuangan yang lebih ketat.

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin di dalam penelitian ini, dominan responden berjenis kelamin laki-laki/pria sebanyak 75 responden atau 62,5% dari total responden yang berjumlah 120 responden. Selain itu responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 45 responden atau 37,5%.

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan di dalam penelitian ini, dominan responden memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 95 responden atau 79,16% dari total responden yang berjumlah 120 responden. Selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 11 responden atau 9,16%. Responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 8 responden atau 6,67%. Responden dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 4 responden atau 3,34%. Dan responden memiliki pendidikan SMA sebanyak 2 responden atau 1,67%. Pendidikan terakhir mempengaruhi kemampuan, wawasan dan tingkat kepercayaan diri dari responden dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan sangat penting guna meningkatkan kemampuannya. Responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi mampu bekerja dengan tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang lebih tinggi (Robbins, 2001).

Deskripsi responden berdasarkan lama menduduki jabatan dalam penelitian ini, dominan responden memiliki lama menduduki jabatan 5-10 tahun sebanyak 85 responden atau 70,8% dari total responden yang berjumlah 120 responden. Selain itu responden dengan lama menduduki jabatan < 5 tahun sebanyak 20 responden atau 16,7%. Responden dengan lama menduduki jabatan >10 tahun sebanyak 15 responden atau 12,5%. Lama menduduki jabatan sangat mempengaruhi penguasaan rincian pekerjaan, dimana responden

dengan usaha yang lebih lama mempunyai pengalaman, kepercayaan diri dan penguasaan *job description* yang lebih baik (Robbins, 2001). Kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dalam bertindak, berpikir serta pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh lama menduduki jabatan, disamping usia karyawan.

4.2.2 Analisis Deskriptif Karakteristik Variabel

Bagian ini akan menganalisis tabulasi jawaban responden secara deskriptif dengan alat analisis deskriptif menggunakan SPSS 23.0. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sebaran dari hasil penyebaran kuisioner mengenai variabel-variabel pada penelitian ini khususnya pada seluruh indikator. Variabel tersebut antara lain: asimetri informasi dan *budgetary slack*. Setiap variabel dianalisis kecenderungannya dengan melihat rata-rata *mean rank* masing-masing variabel yang sudah dikategorikan. Kemudian dilakukan perhitungan interval data dalam 5 (lima) kategori, yaitu: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju.

Untuk kategorisasi digunakan metode perhitungan interval kelas, dengan rumus :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Nilai tertinggi adalah 5, sedangkan nilai terendah adalah 1, jumlah kelas = 5, maka nilai interval kelas sama dengan 0,8. Batas kategori kelas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kategori Penilaian

Interval	Kategori Penilaian	Nilai
$1,00 \leq X \leq 1,80$	Sangat Tidak Setuju	1
$1,81 \leq X \leq 2,60$	Tidak Setuju	2
$2,61 \leq X \leq 3,40$	Ragu-ragu	3
$3,41 \leq X \leq 4,20$	Setuju	4
$4,21 \leq X \leq 5,00$	Sangat Setuju	5

Sumber : Hasil Olah Data (2018)

Kategori jawaban sangat tidak setuju menggambarkan penolakan yang sangat terhadap pernyataan indikator bila dihubungkan dengan variabel penelitian. Kategori jawaban tidak setuju menggambarkan persepsi penolakan terhadap indikator variabel, namun dengan tekanan yang lebih rendah dari pernyataan sangat tidak setuju. Kategori jawaban ragu-ragu menggambarkan persepsi penerimaan terhadap sejumlah indikator namun pada kondisi yang masih ragu-ragu disebabkan adanya indikasi keseimbangan preferensi informasi yang diterima atau dapat pula justru terjadi mix-informasi. Kategori jawaban setuju mengindikasikan adanya penerimaan terhadap pernyataan indikator. Kategori jawaban sangat setuju mengindikasikan bahwa responden dengan sangat yakin menganggap bahwa pernyataan indikator adalah sangat benar dan sesuai dengan apa yang dipersepsikan secara nyata.

Persepsi responden berdasarkan kategori penilaian pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa jika nilai tanggapan responden antara ($1,00 \leq X \leq 1,80$) berarti persepsi responden adalah sangat tidak setuju terhadap indikator-indikator dalam menjelaskan variabel tertentu. Demikian pula halnya jika rata-rata pilihan responden antara ($4,21 \leq X \leq 5,00$) berarti responden sangat setuju terhadap indikator-indikator yang menjelaskan variabel tertentu.

1. Deskripsi Variabel Asimetri informasi

Hasil yang diperoleh dari analisis deskriptif secara keseluruhan untuk variabel asimetri informasi diukur dengan menggunakan 9 pertanyaan yakni: “saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan anggaran dibandingkan dengan pimpinan dan rekan kerja, saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan transaksi keuangan organisasi dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja, saya lebih banyak mengetahui seluruh hubungan antara anggaran, program dan data transaksi keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja, saya lebih banyak mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja, saya lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja, saya lebih banyak memahami isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja, saya lebih banyak mengerti seluk beluk pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja, saya lebih banyak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja, saya lebih banyak mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja”, dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Asimetri informasi

Indikator	Skor Jawaban										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan anggaran dibandingkan dengan pimpinan dan	1	0,8	13	10,8	43	35,8	47	39,2	16	13,3	84,8

Indikator	Skor Jawaban										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Rekan kerja											
Saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan transaksi keuangan organisasi dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja	3	2,5	9	7,5	33	27,5	59	49,2	16	13,3	87,2
Saya lebih banyak mengetahui seluruh hubungan antara anggaran, program dan data transaksi keuangan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja	5	4,2	12	10,0	21	17,5	48	40,0	34	28,3	90,8
Saya lebih banyak mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja	6	5,0	8	6,7	34	28,3	39	32,5	33	27,5	89
keuangan yang selesai Saya lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja	2	1,7	10	8,3	30	25,0	47	39,2	31	25,8	91
Saya lebih banyak memahami isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja	4	3,3	10	8,3	37	30,8	49	40,8	20	16,7	86,2
Saya lebih banyak mengerti seluk beluk pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja	2	1,7	11	9,2	41	34,2	44	36,7	22	18,3	86,6

Indikator	Skor Jawaban										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Saya lebih banyak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja	2	1,7	24	20,0	39	32,5	42	35,0	13	10,8	80
Saya lebih banyak mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja	2	1,7	24	20,0	39	32,5	42	35,0	13	10,8	80
											4,03

Sumber : Data diolah untuk Skripsi ini (2018)

Tabel 4.5 merupakan tanggapan responden terhadap sejumlah indikator asimetri informasi. Total tanggapan masing-masing indikator menunjukkan bahwa secara rata-rata berada pada kategori setuju.

Indikator yang dominan membentuk variabel asimetri informasi dalam penelitian ini adalah saya lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja dengan nilai mean 91. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan sangat setuju dengan persentase sebesar 39,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja.

Indikator dengan nilai mean tertinggi kedua membentuk variabel asimetri informasi dalam penelitian ini adalah "saya lebih banyak mengetahui proses

penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja” dengan nilai mean 89. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 32,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden lebih banyak mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja.

Indikator dengan nilai mean tertinggi ketiga membentuk variabel asimetri informasi dalam penelitian ini adalah “saya lebih banyak mengetahui seluruh hubungan antara anggaran, program dan data transaksi keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja” dengan nilai mean 90,8. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 40,0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden lebih banyak mengetahui seluruh hubungan antara anggaran, program dan data transaksi keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja.

Indikator dengan nilai mean tertinggi keempat membentuk variabel Asimetri informasi dalam penelitian ini adalah “saya lebih banyak memahami isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja” dengan nilai mean 91. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 39,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden lebih banyak memahami isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja.

Indikator dengan nilai mean tertinggi kelima membentuk variabel Asimetri informasi dalam penelitian ini adalah “saya lebih banyak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja” dengan nilai mean 80. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 35,0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden lebih banyak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja.

Indikator dengan nilai mean tertinggi keenam membentuk variabel asimetri informasi dalam penelitian ini adalah “saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan anggaran dibandingkan dengan pimpinan dan rekan kerja” dengan nilai mean 84,8. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 39,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan anggaran dibandingkan dengan pimpinan dan rekan kerja.

Indikator dengan nilai mean tertinggi ketujuh membentuk variabel asimetri informasi dalam penelitian ini adalah “saya lebih banyak mengerti seluk beluk pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja” dengan nilai mean 86,6. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase masing-masing sebesar 36,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden lebih banyak mengerti seluk beluk pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja.

Indikator dengan nilai mean tertinggi kedelapan membentuk variabel asimetri informasi dalam penelitian ini adalah “saya lebih banyak mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja” dengan nilai mean 80. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase masing-masing sebesar 35,0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden lebih banyak mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja.

Indikator dengan nilai mean tertinggi kesembilan membentuk variabel asimetri informasi dalam penelitian ini adalah “saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan transaksi keuangan organisasi dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja” dengan nilai mean 87,2. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 49,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan transaksi keuangan organisasi dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja.

2. Deskripsi Variabel Budgetary slack

Hasil yang diperoleh dari analisis deskriptif secara keseluruhan untuk variabel budgetary slack diukur dengan menggunakan 7 pertanyaan yakni: “Saya memiliki produktivitas tinggi dalam wilayah tanggung jawab saya dengan standar anggaran yang ada, saya dapat memastikan program departemen saya dapat terlaksana jika didukung anggaran yang besar, saya selalu mengusulkan anggaran yang tinggi untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, saya sangat

mudah merealisasikan program dan anggaran yang menjadi tanggung jawab saya, saya tidak ingin memperbaiki tingkat efisiensi dengan adanya target anggaran yang harus saya capai, saya sangat mudah untuk mencapai dan merealisasikan sasaran yang dijabarkan dalam anggaran, saya menaikkan anggaran di atas standar dengan alasan rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumberdaya”, dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Budgetary slack

Indikator	Skor Jawaban										Mean
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Saya memiliki produktivitas tinggi dalam wilayah tanggung jawab saya dengan standar anggaran yang ada	7	5,8	3	2,5	24	20,0	45	37,5	41	34,2	94
Saya dapat Memastikan Program departemen saya dapat terlaksana jika didukung anggaran yang besar	2	1,7	8	6,7	34	28,3	46	38,3	30	25,0	90,8
Saya selalu mengusulkan anggaran yang tinggi untuk mengatasi kondisi ketidakpastian	1	0,8	28	23,3	29	24,2	47	39,2	15	12,5	81,4
Saya sangat mudah merealisasikan Program dan anggaran yang menjadi tanggung jawab saya	2	1,7	11	9,2	35	29,2	39	32,5	33	27,5	90
Saya tidak ingin memperbaiki tingkat efisiensi dengan adanya target anggaran yang harus saya	3	2,5	9	7,5	44	36,7	45	37,5	19	15,8	85,6

Indikator	Skor Jawaban										Mean	
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
capai												
Saya sangat mudah untuk mencapai dan merealisasikan sasaran yang dijabarkan dalam anggaran	3	2,5	13	10,8	25	20,8	46	38,3	33	27,5	90	
Saya menaikkan anggaran di atas standar dengan alasan rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumberdaya	3	2,5	15	12,5	25	20,8	45	37,5	32	26,7	89,6	
											4,01	

Sumber : Data diolah untuk Skripsi ini (2018)

Tabel 4.6 merupakan tanggapan responden terhadap sejumlah indikator budgetary slack. Total tanggapan masing-masing indikator menunjukkan bahwa secara rata-rata berada pada kategori setuju.

Indikator yang dominan membentuk variabel budgetary slack dalam penelitian ini adalah “saya memiliki produktivitas tinggi dalam wilayah tanggung jawab saya dengan standar anggaran yang ada” dengan nilai mean 94. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori sangat setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 37,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki produktivitas tinggi dalam wilayah tanggung jawabnya dengan standar anggaran yang ada.

Indikator dengan nilai mean tertinggi kedua dari variabel *budgetary slack* dalam penelitian ini adalah “saya dapat memastikan program departemen saya

dapat terlaksana jika didukung anggaran yang besar” dengan nilai mean 90,8. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 38,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden dapat memastikan program departemen dapat terlaksana jika didukung anggaran yang besar.

Indikator dengan nilai mean tertinggi ketiga dari variabel *budgetary slack* dalam penelitian ini adalah “saya sangat mudah untuk mencapai dan merealisasikan sasaran yang dijabarkan dalam anggaran” dengan nilai mean sebesar 90. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 32,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pedagang yakin bahwa responden sangat mudah untuk mencapai dan merealisasikan sasaran yang dijabarkan dalam anggaran.

Indikator dengan nilai mean tertinggi keempat dari variabel *budgetary slack* dalam penelitian ini adalah “saya menaikkan anggaran di atas standar dengan alasan rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumberdaya” dengan nilai mean sebesar 89,6. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 37,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menaikkan anggaran di atas standar dengan alasan rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumberdaya.

Indikator dengan nilai mean tertinggi kelima dari variabel *budgetary slack* dalam penelitian ini adalah “saya tidak ingin memperbaiki tingkat efisiensi

dengan adanya target anggaran yang harus saya capai” dengan nilai mean sebesar 85,6. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 37,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden tidak ingin memperbaiki tingkat efisiensi dengan adanya target anggaran yang harus dicapai.

Indikator dengan nilai mean tertinggi keenam dari variabel *budgetary slack* dalam penelitian ini adalah “saya selalu mengusulkan anggaran yang tinggi untuk mengatasi kondisi ketidakpastian” dengan nilai mean sebesar 81,4. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 37,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden selalu mengusulkan anggaran yang tinggi untuk mengatasi kondisi ketidakpastian.

Indikator dengan nilai mean tertinggi ketujuh dari variabel *budgetary slack* dalam penelitian ini adalah “saya sangat mudah merealisasikan Program dan anggaran yang menjadi tanggung jawab saya” dengan nilai mean sebesar 90. Persepsi atas indikator tersebut berada pada kategori setuju, dimana kondisi ini terlihat dari persepsi responden yang dominan menyatakan setuju dengan persentase sebesar 32,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden sangat mudah merealisasikan program dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

4.3. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi dan korelasi dimaksudkan untuk dapat menguji pengaruh dan hubungan antara Asimetri Informasi terhadap kinerja *Budgetary Slack*. Oleh karena itulah dalam melakukan analisis regresi maka dapat disajikan hasil olahan data SPSS for 23 yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

TABEL 4.7
HASIL OLAHAN DATA REGRESI DENGAN MENGGUNAKAN SPSS

Variabel	B	Std. Error	Thitung	Sign
Constant	0,889	0.226	3,938	0.000
Asimetri Informasi	0.783	0.062	12,699	0.000

Sumber : Hasil SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 yakni hasil olahan data regresi dengan menggunakan program SPSS maka persamaan regresi dapat disajikan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta X_1 + e$$

Sehingga dari hasil olahan data maka persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0.889 + 0.783X_1$$

Dimana :

$a = 0.889$ merupakan nilai intercept/reciprocal yang artinya jika Asimetri Informasi tetap maka *budgetary slack* Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,889 dengan asumsi faktor lain dianggap konstan.

$b_1 = 0.783$ yang artinya apabila Asimetri Informasi (X_1) meningkat sebesar 1 satuan, maka *budgetary slack* Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan akan meningkat sebesar 0.783 dengan asumsi faktor lain dianggap konstan.

4.3.1 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan secara Parsial dengan Uji-t serta uji koefisien determinan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji-t)

Pengujian secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen yakni Asimetri Informasi terhadap variable dependen *Budgetary Slack* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 4.8
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS SECARA PARSIAL (Uji -t)

Variabel	B	Std. Error	thitung	Sign
Constant	0,889	0.226	3,938	0.000
Asimetri Informasi	0.783	0.062	12,699	0.000

Sumber : Hasil Analisis Data, 2018

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen (Asimetri Informasi) terhadap *Budgetary Slack* secara parsial, dapat dilakukan dengan melihat nilai-t hitung > t-table (1,678) dengan $\alpha < 0,05$, sedangkan Asimetri Informasi terhadap *Budgetary Slack* secara Parsial nilai-t hitung < t-table(1,678) sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.8 pengujian terhadap variable Asimetri Informasi (X1) menunjukkan bahwa nilai t-hitung 12,699 > t-tabel 1,678 dan tingkat signifikansi 0,000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Asimetri Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Budgetary Slack* dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

4.3.2 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk menerangkan seberapa besar pengaruh variabel independen (Asimetri Informasi) terhadap variabel dependen *Budgetary Slack*. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 4.9
NILAI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the estimate
1	0,760	0,577	0,574	0,483

Predictors (Constant), X1

Dependent Variable : Y

Sumber : Hasil Olah Data, 2018

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil pengujian determinasi (R²) adalah 0,760. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel independen (Asimetri Informasi) terhadap variabel dependen *Budgetary Slack* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 57,7%, ini menunjukkan bahwa *Budgetary Slack* dapat dijelaskan (dipengaruhi) oleh Asimetri Informasi sebesar 57,7%, sedangkan sisanya 42,3 % dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Untuk mengetahui kerikatan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat dari hasil uji koefisien korelasi (R) pada table 4.9 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,760 atau 76 %, hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel independen (Asimetri Informasi) terhadap variabel dependen *Budgetary Slack* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,760.

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap hubungan korelasi atau seberapa kuat hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) sebagai berikut :

TABEL 4.10
INTERPRETASI NILAI KORELASI

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2011

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan korelasi antara variabel independen (Asimetri Informasi) terhadap variabel dependen *Budgetary Slack* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kuat.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel independen (Asimetri Informasi) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *Budgetary Slack* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan secara parsial Asimetri Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Budgetary Slack* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan Asimetri Informasi sangat ditentukan oleh indikator 1). Memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan anggaran dibandingkan

dengan pimpinan dan Rekan kerja. 2). Memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan transaksi keuangan organisasi dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja. 3). Lebih banyak mengetahui seluruh hubungan antara anggaran, program dan data transaksi keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja. 4). Lebih banyak mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja. 5). Lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja. 6). Lebih banyak memahami isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja. 7). Lebih banyak mengerti seluk beluk pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja. 8) Lebih banyak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja. 9). Lebih banyak mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja. Berdasarkan hasil koesener rata-rata jawaban responden setuju bahwa Asimetri Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mendorong meningkatnya *Budgetary Slack* dengan demikian jika semua indikator variabel Asimetri Informasi ditekan dalam mendorong menurunnya *budgetary slack*, maka *budgetary slack* akan menurun, hal ini dapat dijelaskan bahwa jika Asimetri Informasi yang terjadi antar unsur dalam pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih harus ditekan atau dikurangi guna menurunkan *budgetary slack* yang terjadi.

Variabel Asimetri Informasi Pemerintah Povinsi Sulawesi Selatan secara deskriptif berada dalam kategori tinggi. Indikator yang memberikan kontribusi

tertinggi terhadap Asimetri Informasi masing-masing secara berurutan adalah Saya lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja dengan nilai mean 91, Saya lebih banyak mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja dengan nilai mean 89, Saya lebih banyak memahami isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja dengan nilai mean 86,2, Saya lebih banyak mengetahui seluruh hubungan antara anggaran, program dan data transaksi keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja 90,8, Saya lebih banyak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja dengan nilai mean 80, Saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan anggaran dibandingkan dengan pimpinan dan rekan kerja dengan nilai mean 84,8, Saya lebih banyak mengerti seluk beluk pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja dengan nilai mean 86,6, Saya lebih banyak mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja dengan nilai mean 80, Saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan transaksi keuangan organisasi dibandingkan dengan atasan dan rekan kerja dengan nilai mean 87,2.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nining Widianingsih yang meneliti Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack* (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun anggaran 2017), dimana Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Asimetri Informasi berpengaruh Terhadap *Budgetary Slack*. Besarnya pengaruh Asimetri Informasi

Terhadap *Budgetary Slack* sebesar 57,3%, dan sisanya 42,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti partisipasi anggaran.

Agum Arthaswada, 2015, Meneliti Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack* Dengan *Self Esteem* Sebagai Variabel Pemoderasi : Studi Eksperimen Dalam Konteks Penganggaran Partisipatif Menemukan Bahwa Tingkatan Asimetri informasi berpengaruh terhadap *budgetary slack*. Hal tersebut ditunjukkan oleh $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $3,134 > 3,067$ dan $p\text{-value } 0,047 < 0,05$. Pada Uji LSD, kelompok asimetri informasi rendah dan asimetri informasi tinggi memiliki perbedaan rata-rata nilai *budgetary slack* yang paling besar, yaitu 0,1236 dengan signifikansi $0,029 < 0,05$. (2) *Self esteem* berpengaruh pada hubungan asimetri informasi terhadap *budgetary slack*. Hal tersebut ditunjukkan oleh $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $3,853 < 3,068$ dan $p\text{-value } 0,024 < 0,05$.

Ratih Perwani, 2013, meneliti Pengaruh Asimetri Informasi, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran (Studi Kasus Pada Pt. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang) menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap senjangan anggaran, Variabel asimetri informasi diketahui nilai $t_{hitung} = 2,100$ dan $t_{tabel} > 2,000$ dengan nilai signifikansi $0,039 < \alpha = 0,05$. semakin meningkat asimetri informasi, maka dapat meningkatkan senjangan anggaran atau *budgetary slack*.

Ditinjau dari Teori Agensi maka hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih (voter) atau rakyat. Implikasi

penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*). Masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif adalah cenderung memaksimalkan utiliti (*self-interest*) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan "budgetary slack". Hal ini terjadi dikarenakan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif dan masyarakat/rakyat, bahkan untuk kepentingan pilkada berikutnya. Namun demikian budgetary slack APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (*self interest*) ketimbang untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya Masalah keagenan yang timbul di kalangan legislatif (anggota dewan) terjadi dari dua tinjauan perspektif, sebagai prinsipal atas eksekutif dan sebagai agen dengan rakyat (pemilih). Masalah keagenan yang timbul dalam perspektif prinsipal akan cenderung melakukan "kontrak semu" dengan pihak eksekutif karena memiliki *discretionary power*. Dalam proses penyusunan anggaran, pihak legislatif cenderung melakukan "titipan" proyek/kegiatan, hal ini terjadi untuk kepentingan pribadi secara jangka panjang demi menjaga kesinambungan dan mengharumkan nama politisi/anggota dewan. Selanjutnya Masalah keagenan anggota legislatif sebagai agen, dimana posisi legislatif sebagai pihak agen dan rakyat/pemilih sebagai pihak prinsipal. Pihak legislatif sebagai agen akan membela kepentingan rakyat atau pemilihnya, namun

seringkali ini tidak terjadi, karena pendelegasian kewenangan rakyat/pemilih terhadap legislatornya tidak memiliki kejelasan aturan konsekuensi kontrol keputusan yang disebut "abdication". Akibatnya, legislator cenderung menyusun anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongannya dan kondisi ini disebut oleh Garamfalvi (1997) sebagai *political corruption* dalam proses penyusunan anggaran, dan sekiranya anggaran tersebut dilaksanakan akan menimbulkan *administration corruption*. Kalau kondisi di atas terjadi, maka proses penyusunan/perubahan anggaran APBD yang semestinya akan menghasilkan outcome yang efisien, efektif dan ekonomis dari alokasi sumber daya dalam anggaran akan terdistorsi karena adanya perilaku opportunistik menggunakan keunggulan informasi yang dimiliki untuk kepentingan pribadi dan politisi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asimetri Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya *Budgetary slack* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Asimetri Informasi memiliki peran besar dalam kejadian *Budgetary Slack*.
2. Indikator Asimetri Informasi yang paling berpengaruh terhadap *Budgetary Slack* adalah adanya partisipan yang lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerjanya.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka disarankan :

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya mengatasi Asimetri Informasi yang terjadi antar penganggaran partisipati dengan open informasi terutama laporan keuangan sehingga *Budgetary Slack* dapat ditekan.
2. Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya mengatasi partisipan yang lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan dikerjakan dibandingkan dengan Atasan dan Rekan Kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. A. (2013). *“The Influence of Horizontal Equity, Self Efficacy, and Ethical Position on The Creation of Budgetary Slack”*. Virginia Commonwealth University : Disertasi.
- Anthony, Robert N., dan Vijay Govindarajan. (2005). *Management Control System*. Buku 2. Edisi ke 11. Penerjemah : F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdullah. 2012. Pengaruh Kepribadian, Self efficacy, Locus of control, Asimetri Informasi terhadap Persepsi Kinerja Usaha Skala Kecil dan Menengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. September 2010, vol.17, No.2, hal.144-160. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Anthony, Robert N., & Vijay Govindarajan. (2017). *Management Control System*. USA : McGraw-Hill
- 2015. *Management Control System*. 15th Ed , USA : McGraw-Hill
-2008, *Management Control System*, 12th Ed. USA, McGraw-Hill Irwin.
- 2007, *Management Control System*, McGraw Hill, New York.
- 2005, *Management Control System*, 9th Ed. McGraw Hill, New York.
- Arthaswadaya, Agum. 2015. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack* Dengan *Self Esteem* Sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anas Sudijono. (2011). *“Pengantar Statistik Pendidikan”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar Sanusi. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- (2015) *Penyusunan Skala Psikolog*”. Edisi IV. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Asrininggati, Lilik., dan Hidayati, L.A.(2016). “Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran, Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Magelang”. Universitas Muhammadiyah Malang
- Arfan Ikhsan. (2017). *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

- Azwar S. (2015). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Blocher, Edward J. (2017). *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat
- (2007). *Manajemen Biaya*. Ed.2, Jakarta: Salemba Empat
- Coopersmith. (2010). *The Antecedents of Self Esteem*. USA : W. H, Freeman and Company
- Darlis, Edfan. (2012). Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *Jurnal Riset dan Akuntansi Indonesia*. Vol. 5. No. 1
- Drlis., dan Fadilah, N, I. 2002. "Efek Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, Group Cohesiveness dan Motivasi Dalam Hubungan Kausal Antara Budgeting Participation dan Budgetary Slack". *ISSN: 1858-2559. Proceeding PESAT (psikologi, ekonomi, sastra, arsitektur dan sipil)*. Vol. 4, Oktober 2011. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- De Faria, Juliano Almeida. (2013). "The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack; An Experimental Research". *African Journal of Business Management*. Vol 7(13). Hlm. 1086-1099.
- Dewi Jaya. 2013. *The Effects of Budget Participation, Asymmetric Information, Budget Emphasis, and Organizational Commitment On Budgetary Slack In Pemerintah Kota Pasuruan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Dewi Ratna Purnama. (2017). Pengaruh *Budgetary Goal Characteristic* terhadap Senjangan Anggaran: Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Dewi Priyatno. (2016). Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta : Gava Media.
- Douglas, P.C., & Wier, Benson. (2010). "Integrating Ethical Dimension into A Modal of Slack Creation". *Journal of Business Ethic*. Vol. 28. Hlm. 267 - 277.
- Douglas,P.C, and Wler, Benson. 2011. "Integrating Ethical Dimensions Into A Model Of Budgetary Slack Creation". *Journal Of Business Ethics*, vol 28
- Dunk, Alan S. dan Hector Perera. 1996. "The Incidence of Budgetary Slack: A Field Study Exploration". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, No. 10 (5), 649-664.

-1983, "The Effects of Budget Emphasis and Information Asymmetry on The Relation Between Budgetary Participation and Slack". *The Accounting Review*, Vol. 68 (2). Pp. 400-410.
- (2013). *The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetary Participation and Slack*. The Accounting Review: Milwaukee.
- Efferin S., Darmadji S.H., & Tan, Y. (2017). *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Emi Argyris, 2015, *The design of the cooperate budgeting system: influences on managerial behaviour and performance*, *The Accounting Review*, 56(October): 813 – 829
- Falikhaturun. (2017). Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, dan *Group Cohesiveness* dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan *Budgetary Slack* (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah se-Jawa Tengah). *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*. Makasar (26-27 Juli 2017).
- 2007. "Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi dan *Group Cohesiveness* dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan *Budgetary Slack*". *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Field, Linda. (2014). *"Self Esteem for Women: A Practical Guide to Love, Intimacy and Succes"*. London: Vermilion.
- Gibson, et al. (2015). *Organisasi dan Manajemen*. Edisi Keempat. Jakarta : Erlangga.
- Hansen & Mowen. (2016). *Buku I Management Accounting*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
-2009, "*Multiple facets of budgeting: an exploratory analysis*", *Management Accounting Research*, Vol. 15 No. 4, pp. 415-39.
- Hamid, Darmadi. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hogg, A., & Vaughan, G.M. (2012). *Social Psychology*. London: Prentice Hall.
- Ikhsan A & Ishak M. (2015). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam Ghozali. (2016). "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*". Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro N., & Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

- Jensen, M., & Meckling, W. (2006). *Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Finance Economics* 3. Hlm. 305 - 360.
- Jogiyanto, A. dan L. Ane. (2010). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan menggunakan lima Variabel Pemoderasi. *Journal Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Komalasari, P.T., J.R. Joesoef, & M, Nashih. 2013. Pengaruh Negosiasi dan Asimetri Informasi terhadap *Budget Outcomes*: Sebuah Eksperimen. *Proceeding, Symposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya (16-17 Oktober). Hlm. 994 - 1007.
- Lukka, K. (1988). "Budgetary Biasing in Organizations: Theoretical Framework and Empirical Evidence". *Accounting, Organization, and Society* 13.hal. 281-301.
- Koroy, Izzetin. 2008. Effect of Budgetary Goal Characteristic on Manajerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*. Vol 4:707 – 720.
- Mahsun, Mohamad., Sulistyowati, Firma., dan Purwanugraha, H.A. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua.Yogyakarta.BPFE.
- Mulyadi. 2011. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi keempat, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,
- M. Nafarin .2017, *Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat*, Edisi Revisi Jakarta.
-2017, *Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat*, Edisi 3, Jakarta.
- Ompusunggu Krisler dan Rangga Buwana Icuk, 2016. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevan Information terhadap Informasi Asimetri*, **Simposium** Nasional Akuntansi 9, Padang
- Onsi, M, 1973, "Factor Analysis of Behavioral Variables Affecting Budgetary Slack". *The Accounting Review*, Vol. 48. Pp. 535-548.
- Perwani, Ratih. 2013. Pengaruh Asimetri Informasi, Partisipasi Anggaran dan komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran (Studi Kasus Pada PT Angkasa Pura I (Persero). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmawati. 2013. Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy, And Locos Of Control Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Perspektif Balance Scorecard Pada PERUM Pegadaian Boyolali. E-Journal STIE AUB Surakarta.
- Rudianto Ahmad. 2011. *Sistem Manajemen Kinerja*. Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- 2009. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Whitton, Samad. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PTRafika ADITAMA.
- Schiff, M., dan A.Y. Lewin, 1970, "The Impact of People on Budgets". *Accounting Review*, Vol 45. Pp. 259-268.
- Scott, M., dan A.Y. Lewin, 1970, "The Impact of People on Budgets". *Accounting Review*, Vol 45. Pp. 259-268.
-, 2010, *Do Perceptions Of Fairness Mitigate Managers' Use Of budgetary Slack During Asymmetric Information Conditions?:* Vol. 4, *Advances in Management Accounting*.
- Soobaroyen. 2005. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PTRafika ADITAMA.
- Siegel, G. dan H.R. Marconi. 1989. *Behavioral Accounting*. Cincinnati. Ohio. South-Western Publishing Co.
- Stede, D.E., (2000), "The Effects of Reputation and Ethics on Budgetary Slack". *Journal Management Accounting Research*, Vol.14. Pp. 153–171.
- Stevens, D.E., (2002), "The Effects of Reputation and Ethics on Budgetary Slack". *Journal Management Accounting Research*, Vol.14. Pp. 153–171.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan* . Alfabeta. Bandung
- Welch, S.M. (2010). "Participative Budgeting: The Effects of Risk Aversion and Symmetric Information on Budgeting Slack". *Journal of Accounting Research*, Vol. 23 (2). Pp. 829–8

KUESIONER

Kepada yang terhormat :
Bapak/Ibu Saudara(i) Calon Responden

Dengan Hormat,

Sebelumnya perkenalkan nama saya **Aulia Mukti Tama**, mahasiswi Program Sarjana di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa. Saat ini saya sedang melakukan Penelitian yang berjudul **Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Budgetary Slack* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**, saya berharap Bapak/ Ibu untuk berpartisipasi sekitar **5-10 menit** untuk mengisi **lembar kuesioner** yang telah saya berikan. Keberhasilan riset ini tergantung dari kemurahan hati Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktunya sebagai narasumber. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kerahasiaan jawaban yang saudara isi akan dijamin dan semata-mata hanya untuk menyelesaikan studi.

Demikian Permohonan saya, atas bantuan serta partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Makassar,..... April 2018
Hormat saya,

Aulia Mukti Tama

QUESTIONNAIRES

1.1 IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu Mengisi daftar berikut :

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : _____ Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2 S3
5. Jabatan :
6. Lama Bapak/Ibu menduduki jabatan ini : 1-5 th 5-10 th >10 th
7. Latar Belakang Pendidikan :
8. Divisi kerja :
9. Apakah anda pernah berpartisipasi dalam penyusunan anggaran :
1) Ya 2) Tidak

1.2 DAFTAR PERTANYAAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (\checkmark) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu :

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

RR = Ragu-Ragu

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
Asimetri Informasi :						
1.	Saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan anggaran dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja.					
2.	Saya memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan transaksi keuangan organisasi dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja					
3.	Saya lebih banyak mengetahui seluruh hubungan antara anggaran, program dan data transaksi keuangan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja					
4.	Saya lebih banyak mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja					
5.	Saya lebih banyak mengetahui isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja					
6.	Saya lebih banyak memahami isi dan angka anggaran dan laporan keuangan yang selesai dikerjakan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja					
7.	Saya lebih banyak mengerti seluk beluk pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja					
8.	Saya lebih banyak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja					
9.	Saya lebih banyak mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun dibandingkan dengan atasan dan Rekan kerja					
Budgetary Slack :						
10.	Saya memiliki produktivitas tinggi dalam wilayah tanggung jawab saya dengan standar anggaran yang ada.					
11.	Saya dapat memastikan program departemen saya dapat terlaksana jika didukung anggaran yang besar.					
12.	Saya selalu mengusulkan anggaran yang tinggi untuk mengatasi kondisi ketidakpastian.					

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
13.	Saya sangat mudah merealisasikan program dan anggaran yang menjadi tanggung jawab saya.					
14.	Saya tidak ingin memperbaiki tingkat efesiensi dengan adanya target anggaran yang harus saya capai.					
15.	Saya sangat mudah untuk mencapai dan merealisasikan sasaran yang dijabarkan dalam anggaran.					
16.	Saya menaikkan anggaran di atas standar dengan alasan rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumberdaya					

